

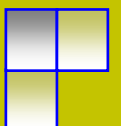


RENCANA KERJA TAHUN 2022

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN KULON PROGO

Alamat : Jalan Sugiman No. 03 Wates Kulon Progo Telp./Fax.
(0274)773026

Email : dinsos@kulonprogokab.go.id
Website : dinsos.kulonprogokab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 dapat kami susun. Rencana Kerja ini disusun guna memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan sekaligus sebagai dokumen program kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022, Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Renstra Perangkat daerah, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 serta dengan memperhatikan isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah, tema dan prioritas pembangunan tahun 2021.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Kerja Dinas ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mohon masukan guna penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dan karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka melaksanakan tugas di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wates, 26 Juli 2021

Kepala Dinas

Drs. YOHANES IRIANTA, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19630527 198903 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	1
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capain Renstra OPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial PPPA.....	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	43
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	44
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	45
3.3. Program dan Kegiatan	45
BAB. IV PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 (Tahun Berjalan) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo	9
Tabel 2.2.1	Indikator Kinerja Program Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 (Perubahan).....	14
Tabel 2.2.2	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Tahun 2020.....	15
Tabel 2.2.3	Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Kondisi Baik dan Kualitas SDM OPD Tahun 2020.....	15
Tabel 2.2.4	Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Kondisi Baik dan Kualitas SDM OPD Tahun 2020.....	16
Tabel 2.2.5	Indeks Perlindungan Sosial Tahun 2020.....	17
Tabel 2.2.6	Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2020.....	18
Tabel 2.2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo.....	20
Tabel 2.2.8	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Tahun 2020.....	22
Tabel 2.2.9	OPD Yang Telah Melaksanakan PPRG dan ARG tahun 2020.....	23
Tabel 2.2.10	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020.....	26
Tabel 2.2.11	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPPK) Tahun 2020.....	27

Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Kulon Progo	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial PPPA Tahun 2022	45
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial PPPA Tahun 2022	47
Tabel 3.3	Usulan Belanja Bantuan Hibah Bansos Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Angka Partisipasi Kerja Perempuan Tahun 2015 – 2020 25

Grafik 2. Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Tahun 2014-2019
Kabupaten Kulon Progo 28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Proses penyusunan Renja Perangkat daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta berpedoman pada Renja Dinas Sosial DIY, DP3AP2 DIY dan Renja Kementerian Sosial dan Renja kementerian PPPA.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial PPPA Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri dalam Negeri negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Perubahan Renstra 2017-2022 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun ke-5 perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPJMD 2017-2022. Sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Sosial PPPA serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 yaitu **Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, Aman, Tentram, Berkarakter, dan Berbudaya berdasarkan iman dan takwa**”.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten. Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan proses sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
5. Telaah terhadap rancangan awal OPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
10. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
11. Pembahasan forum OPD
12. Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Hangka Menengah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Fungsi, dan tugas serta tata kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019.
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon progo Tahun 2022.

18. Keputusan Bupati Nomor 248/A/2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud : Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA di susun dengan maksud Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta untuk mengintegrasikan program-program pembangunan dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

2. Tujuan :
 - a) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b) Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran 2022 dan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun Anggaran 2022,
 - c) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi urusan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.
 - d) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memuat :

	1.1.	Latar Belakang
	1.2.	Landasan Hukum
	1.3.	Maksud dan Tujuan
	1.4.	Sistematika Penulisan
BAB II		HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
		Bab ini memuat :
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu (reviuiw) dan Capaian Renstra OPD
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan OPD
	2.3.	Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
	2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III		TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
		Pada bagian ini diuraikan tentang:
	3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja OPD
	3.3.	Program dan Kegiatan
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
		Bab ini memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang mejadi prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPPA tahun 2022
BAB V		PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dipandang perlu untuk memetakan program kegiatan yang ada di dalam Renstra dengan Peraturan yang baru. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mendukung pencapaian misi yang ke- 2 Daerah, yaitu **Menciptakan system perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan prioritas daerah “Peningkatan pendapatan masyarakat”** Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta tata kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun fungsi dan tugas pokok, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 melaksanakan 8 program, dan 13 kegiatan 22 Sub.Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHh	
	1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
	b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	a	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran

	3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	a	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	a	Penyelenggaraan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	6)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan
	a	Penyediaan Permakanan
	b	Pemberian Bimbingan, Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis dan Masyarakat
	c	Pemberian layanan Rujukan
	7)	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial
	a	Pemberian Layanan data dan Pengaduan
	b	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
	c	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	8)	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/kota
	a	Pendataan fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota
	b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	9)	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota
	a	Penyediaan Makanan
5	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	10)	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	a	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	b	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

6	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	11	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah Kabupaten/Kota
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
	12	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan
	a	Penyajian dan Pemanfaatan data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
8	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK(PHA)	
	13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/Kota

Evaluasi kinerja dan keuangan Renja OPD Tahun 2020 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dalam dokumen Renja Tahun 2020 yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2020. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2020, sedangkan jumlah Anggaran (Rupiah) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2020.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renja untuk Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan Dan Anak dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau berdasarkan atas hasil capaian indikator standar kebutuhan pelayanan. Hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2017-2022 (Perubahan)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja	
			Target 2020	Realisasi 2020
1.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100
2.	Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan Kualitas SDM OPD	%	100	100
3	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	%	100	100
4	Indeks Perlindungan Sosial	%	93,82	96,72
5	Indeks Pemberdayaan Sosial	%	64.41	66.65

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2020

- 1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran merupakan indikator untuk program pelayanan administrasi perkantoran, yang diukur dengan formulasi sebagai berikut:

Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam satu tahun x 100%

Tabel 2.2.2
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2020	Realisasi 2020
1.	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12	12
2.	Jumlah bulan dalam satu tahun	12	12
3.	Capaian Indikator Kinerja	100	100

2) Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD

Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD merupakan indikator untuk program Program Peningkatan Sarana /Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD, yang diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$(\text{Persentase aset kondisi baik} + \text{Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat})/2$

$\text{Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)}}{\text{Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)}}$

Tabel 2.2.3
Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2020	Realisasi 2020
1.	Jumlah aset kondisi baik tahun ke-n	350	350
2.	Jumlah keseluruhan aset tahun ke-n	350	350
3	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)	0	0

4	Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)	0	0
5.	Capaian Indikator Kinerja	100	100

1) Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

Capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja merupakan indikator untuk program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, yang diukur dengan formulasi sebagai berikut :

Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD
 ((Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu) + (Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu) + (Persentase Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu))/3

Tabel 2.2.4
Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2020	Realisasi 2020
1.	Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu	3	3
2.	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD (Renstra OPD, Renja OPD)	3	3
3	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu	14	14
4	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan OPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja Pelayanan OPD, 2 dok SPIP)	14	14
5.	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan)	16	16
	Capaian Indikator Kinerja	100	100

4) Indeks Perlindungan Sosial

Indeks Perlindungan Sosial merupakan indikator untuk Program Perlindungan Sosial, yang diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$((\text{PSKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial} / \text{Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial}) \times 70\%) + ((\text{Jumlah tagana aktif} / \text{Jumlah tagana}) \times 30\%)$

Tabel 2.2.5
Indeks Perlindungan Sosial Tahun 2020

Baru

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2020	Realisasi 2020
1.	PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial	59.750	62.462
2.	Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial	65.536	65.536
3.	Jumlah tagana yang aktif (piket, apel dan Verifikasi Akhir Tahun)	155	155
4.	Jumlah tagana	155	155
	Capaian Indikator Kinerja	93.82	96.72

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Perlindungan Sosial Tahun 2020 tercapai 96,72 melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 93,82 atau tingkat capaian dari realisasi terhadap target 104.54%. Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan Jaminan Sosial dari target 59.750 tercapai 62.462. Pencapaian tersebut karena antara lain bantuan Sosial terdampak Covid 19 yang telah tersalurkan.

TAGANA (Taruna Siaga Bencana) telah terbentuk Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2007 mereka adalah relawan yang membantu dalam mengevakuasi dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Jumlah Tagana yang ada sebanyak 155 orang Bencana alam memerlukan perhatian yang ekstra dan serius, karena bencana sulit diprediksi waktu dan lokasinya sehingga diperlukan manajemen penanggulangan bencana yang baik, komunikasi yang cepat, reaksi yang terukur dan

terarah, serta sinergi semua pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi dampak bencana. Tahun 2020 telah terjadi bencana alam dan non alam, bencana alam telah terjadi sebanyak 35 kejadian tanah longsor 3 titik kejadian, pohon tumbang 32 titik kejadian, bencana tersebut semuanya telah diberikan bantuan. Bencana non alam yang terjadi disebabkan adanya wabah covid 19, banyak masyarakat yang terkena wabah covid 19 tersebut sehingga perlu penanganan secara medis maupun bantuan permukiman/logistik. Bantuan logistik permukiman telah disalurkan kepada 113 KK yang tersebar di 8 kapanewon yaitu kapanewon Wates, Girimulyo, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih, Sentolo, Lendah dan kapanewon Panjatan.

5) Indeks Pemberdayaan Sosial

Indeks Pemberdayaan Sosial merupakan indikator untuk Program Pemberdayaan Sosial, yang diukur dengan formulasi sebagai berikut:

(jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sosial sejenis/Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis) x 100%.

Tabel 2.2.6
Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2020

Baru

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2020	Realisasi 2020
1.	PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis	9.049	9.565
2.	Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis	22.090	22.090
	Indeks Pemberdayaan Sosial	40.96	43.30

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2020 tercapai 43,30 dari target yang ditetapkan sebesar 40,96. PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis sebesar 9.049 target di tahun 2020 dan realisasi 2020 sebesar 9.565.

Dampak wabah Covid 19 sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi terutama penanganan ekonomi masyarakat melalui Pemberdayaan KUBE Akumulasi KUBE tahun sebelumnya yang ada sebanyak 9.565 orang ditambah dengan Pemberdayaan melalui KUBE yang bersumber dari APBD pengembangan 1 kelompok (10 orang), APBN Pengembangan 20 kelompok (200 orang), dana Dekonsentrasi 60 kelompok (600 orang) dan BKK graduasi 179 KPM. sehingga realisasi tahun 2019 sebanyak 9.565 orang, Walaupun pada tahun 2020 pemberdayaan KUBE tidak ada tetapi jumlah pemberdayaan yang dilakukan kumulatif meningkat ditahun sebelumnya dari target yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur melalui:

- 1) Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dengan Indikator Kinerja Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, dengan formulasi sebagai berikut:

((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG/jumlah OPD)x30)+(Jumlah desa yang melaksanakan PUG/jumlah desa)x25)+(jumlah lembaga perempuan dan anak yang aktif/jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada)x25)+(jumlah pekerja perempuan/jumlah angkatan kerja perempuan)x20).

Cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender target dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2.8
Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender Tahun 2020**

No	Uraian	Capaian Kinerja	
		Target 2020	Realisasi 2020
1	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG	32	35
2	Jumlah OPD	42	42
3	Jumlah Desa yang melaksanakan PUG	4	4
4	Jumlah Desa	87	87
5	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang aktif	34	34
6	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada	34	34
7	Jumlah pekerja perempuan	116.655	109.732
7	Jumlah angkatan kerja perempuan	151.500	141.602
	Capaian indikator kinerja program	64.41	66.65

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2020

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender tahun 2020 dari target 64.41 tercapai sebesar 66.65. jadi tingkat capaian

realisasi terhadap target 103.09% Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender, Peningkatan Peranan Wanita, Pembinaan Gerakan Sayang Ibu, Penguatan Pengarusutamaan Gender, dan Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak. Target OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG tahun 2020 adalah 32, tercapai 35 OPD.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi APE 2019 yang dilakukan adalah meningkatkan penerapan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan, antara lain:

1. Meningkatkan jumlah OPD yang melaksanakan penyusunan perencanaan responsive gender dan anggaran responsive gender .
2. Menyusun kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
3. Pemberdayaan perempuan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

Peran serta Perempuan dalam Pembangunan tersebut didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga berbasis Gender, Peningkatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Pemutakhiran data Pilah Gender dan Anak, Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Data terpilah Gender dan Anak merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pengarusutamaan gender dan mendukung Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender OPD yang telah melaksanakan PPRG dan ARG dapat dilihat dalam tabel berikut :

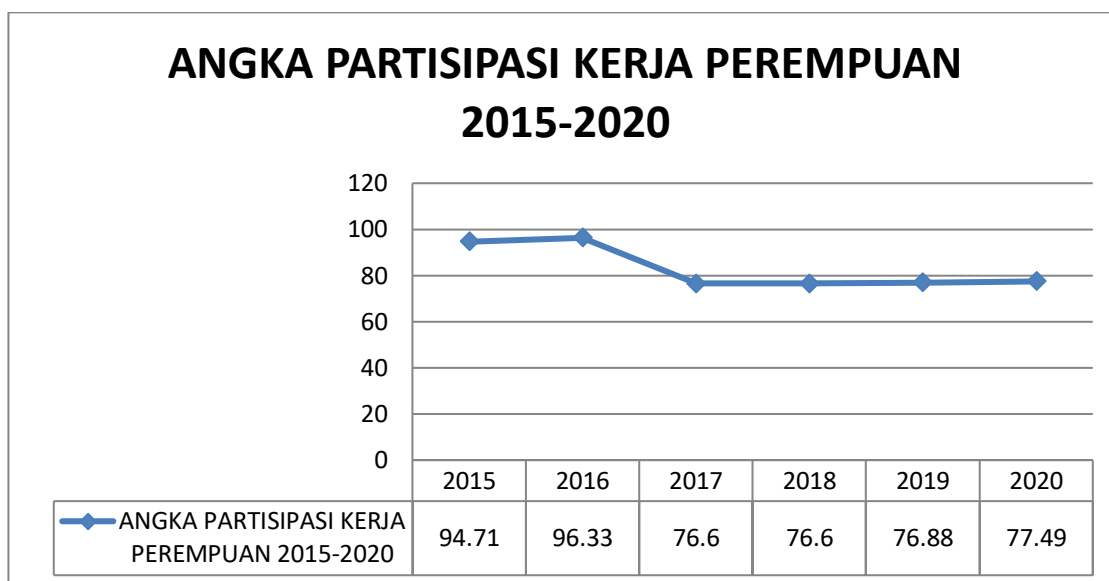
Tabel 2.2.9			
OPD Yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2020			
No	Nama Organisasi Perangkat Daerah		
1	Dinas Sosial PPPA	18	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Dinas Kesehatan	19	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	20	Inspektorat
4	Dinas Perhubungan	21	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
5	Dinas Komunikasi dan	22	Badan Keuangan dan Asset Daerah

	Informasi		
6	Dinas Kebudayaan	23	Bappeda
7	Dinas Pariwisata	24	Kecamatan Kalibawang
8	Satuan Polisi Pamong Praja	25	Kecamatan Nanggulan
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	26	Kecamatan Girimulyo
10	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu	27	Kecamatan Sentolo
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28	Kecamatan Kokap
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29	Kecamatan Pengasih
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30	Kecamatan Lendah
14	Dinas PMDPPdan KB	31	Kecamatan Galur
15	RSUD Wates	32	Kecamatan Panjatan
16	Dinas Lingkungan Hidup	33	Kecamatan Wates
17	Dinas nakertrans	34	Kecamatan Temon
		35	Kecamatan Samigaluh

Jumlah lembaga perempuan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 34 yaitu (GOW), 1 Forum Anak, dan 12 FPKK. Organisasi perempuan yang aktif adalah GOW Kabupaten, PD Salimah, PC. Muslimat NU, PD. Aisyah, Wanita Islam, Bayangkari, Perwosi, WKRI, PWRI, IWAPI, Perwira (perempuan Wira Usaha), IADK Kejaksaan, PERSIT, Puspita Nada, DWP Dinas Pendidikan, Dian Kemala, PERIP, Perwanida, HARPI Melati, Radar Congot, IBI, dan KPPI.

Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan salah satu sub indikator untuk menghitung Capaian angkatan kerja perempuan. Secara terperinci angka partisipasi kerja perempuan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1. Angka Partisipasi Kerja Perempuan 2015 - 2020



Sumber data: Dinas Sosial PPPA diolah 2020

Partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari tahun 2019-2020. Peningkatan ini terjadi karena jumlah perempuan yang bekerja semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Peningkatan partisipasi kerja perempuan ini merupakan salah satu wujud keberhasilan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dilihat dari peningkatan peran perempuan di bidang ketenagakerjaan. Tahun 2017 partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ada pembatasan usia dalam partisipasi angkatan kerja yaitu umur antara 18 tahun sampai dengan 64 tahun, sementara pada tahun 2016 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tidak ada batasannya.

Pada tahun 2020 dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Peningkatan Peranan Wanita, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pengembangan Industri Rumahan dengan sasaran 80 orang perempuan pelaku Industri Rumahan yang berada di 5 (lima) kalurahan dan 3 kapanewon pada tahun 2020 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 5 (lima) kalurahan dan 3 kapanewon tersebut yaitu :

- a. Desa Ngentakrejo , Kecamatan Lendah dengan 20 pelaku Industri Rumahan
- b. Desa Bumirejo Kecamatan Lendah dengan 20 pelaku Industri rumahan
- c. Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo dengan 14 pelaku Industri Rumahan
- d. Desa Tuksono Kecamatan Sentolo dengan 16 pelaku Industri Rumahan
- e. Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo dengan 21 pelaku Industri Rumahan

- 2) Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator Kinerja Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan formulasi sebagai berikut:
((Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif /Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 25) + (Jumlah Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak/Jumlah seluruh kecamatan)x30) + ((Jumlah desa dan kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak/jumlah desa dan kelurahan)x30)+((1-(jumlah kasus KDRT/Jumlah keluarga)x15).

Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak target dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.10
Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2020

No	Uraian	Capaian Kinerja	
		Target 2020	Realisasi 2020
1	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif	110	112
2	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	110	112
3	Jumlah kecamatan yang ditetapkan sebagai kecamatan layak anak	8	8
4	Jumlah seluruh kecamatan	12	12
5	Jumlah desa dan kelurahan yang ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	50	50
6	Jumlah desa dan kelurahan	88	88
7	Jumlah kasus KDRT	55	26
7	Jumlah Keluarga	149.950	151.911
	Capaian indikator kinerja program	77.04	77.04

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2020

Realisasi Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020 dari target sebesar 77.04 % tercapai sebesar 77.04 %. Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Target pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2020 adalah 110 kasus terealisasi 112 kasus. Jumlah kasus tersebut terdata dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Jejaring kerjasama dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), Pelayanan kasus kekerasan tersebut didukung adanya komitmen P2TP2A untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta, didukung dan bekerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat DIY.

Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.11
Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan
Dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2020

No	Jejaring FPKK	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Layanan Dari FPKK Khusus Kasus Baru		
		Perempuan	Anak	Jumlah Korban
1	UPPA POLRES	6	6	12
2	RSUD Wates	3	2	5
3	Dinas Kesehatan	6	2	8
4	P2TP2A	18	65	83
5	Dinsospppa (Peksos)	1	1	2
6	RS.Risky Amalia Medika	0	0	0
7	RS PKU Muh Nanggulan	2	0	2
Jumlah Kasus Baru		36	76	112

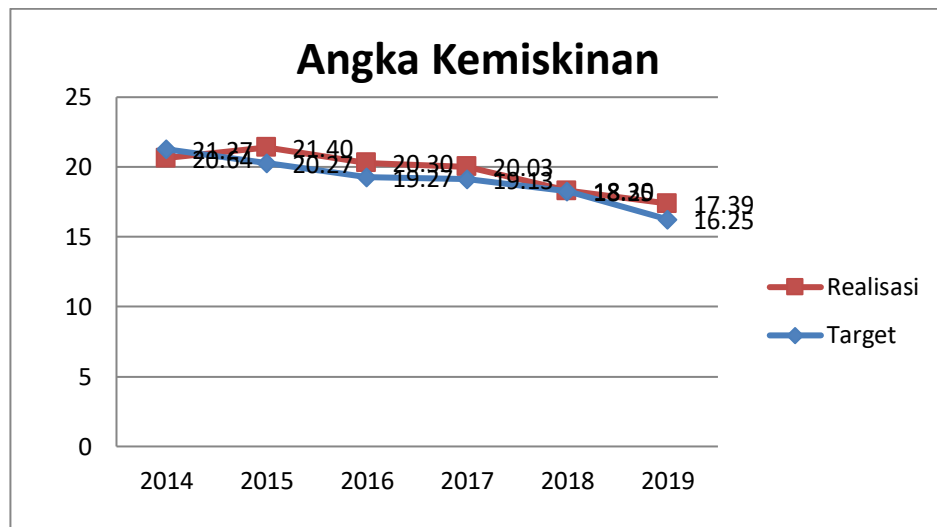
Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo 2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Angka Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo kurun waktu lima tahun dari tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik 2 :

Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Tahun 2014-2019 Kabupaten Kulon Progo



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo cukup serius terhadap Upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Sesuai Perda Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan ini merupakan langkah seirus pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai program terobosan seperti “Gentong rembes” seperti yang diaplikasikan dalam bentuk kegiatan bedah rumah dan jambanisasi telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena dari 17 indikator kemiskinan 5 diantaranya sudah teratasi, yakni :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m²;
2. Jenis lantai terluas bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah;
3. Jenis dinding tempat tinggal terluas terbuat dari bamboo/kayu berkualitas rendah;
4. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik dan atau tagihan listrik rata-rata perbulan kurang dari Rp.17.500,00;
5. Tidak punya fasilitas MCK/milik bersama/umum.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga secara maksimal menggandeng pihak swasta melalui forum CSR dalam penanganan kemiskinan. Dalam jangka panjang

kegiatan investasi akan terus ditingkatkan, terlebih di Kabupaten Kulon Progo dengan adanya beberapa mega proyek yaitu Proses pembangunan bandara baru Internasional, pelabuhan Tanjung Adikarta dan pabrik pengolahan pasir besi yang masuk dalam agenda pembangunan nasional dan kini sudah berjalan. Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan *skill* (ketrampilan), pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa datang.

Isu-isu strategis yang menjadi **tantangan** Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- 1) Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, penyandang disabilitas dan Orang Tua terlantar ;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai ;
- 3) Terbatasnya akses jaminan sosial, perlindungan sosial bagi PMKS dan Pemberdayaan sosial bagi PMKS;
- 4) Minimnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana alam/sosial sementara frekuensi/variasi bencana sangat kompleks;
- 5) Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, termasuk pekerja sosial masyarakat dan potensi kesejahteraan masyarakat lainnya;
- 6) Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS;
- 7) Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah;
- 8) Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga;
- 9) Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kemiskinan merupakan permasalahan utama dan merupakan prioritas utama dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah. Masalah kemiskinan di wilayah Kabupaten Kulon Progo lebih banyak dijumpai di Bagian Utara yang merupakan daerah Perbukitan Menoreh. Gejala kemiskinan tersebut disebabkan antara lain oleh daya dukung alam yang relatif kurang, prasarana sosial ekonomi yang belum merata dan kelembagaan yang belum menjangkau masyarakat setempat serta mutu sumberdaya manusia yang relatif masih rendah.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan

Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah dalam bentuk :

- e. penyuluhan, bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS;
- f. pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- g. penyediaan akses pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi PMKS;

Permasalahan kemiskinan tersebut sangat berkaitan dengan permasalahan dalam Urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten Kulon Progo. **Tantangan yang sekaligus menjadi peluang untuk dapat dikembangkan dalam bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah :**

Permasalahan lain yang menjadi **tantangan** dalam urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

Urusan Sosial :

Berbagai tantangan dan peluang yang mampu dioptimalkan sebagai upaya mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo, seperti :

- a. Jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS;
- b. Adanya kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber pelayanan yang ada.
- c. Semangat kesetiakawanan sosial yang perlu terus dikembangkan kepada seluruh elemen, sehingga nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong-royong mampu menjadi modal sosial yang kuat dalam upaya penanganan berbagai masalah sosial.
- d. Sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, seperti Panti Sosial. Secara kelembagaan sudah ada , namun sarana prasarana pendukung belum ada.
- e. Kebijakan yang mengarah pada pola jaminan sosial bukan bantuan sosial bagi PMKS yang tidak potensial, seperti Lanjut usia miskin, dan penderita cacat berat. Selain itu program-program penguatan kapasitas PMKS juga perlu terus dilakukan untuk mendorong kemandirian.
- f. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terus dilakukan sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagaan tersebut dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial.

Urusan Pemberdayaan Perempuan :

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan daerah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, seperti :

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagakan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

- d. Pengungkapan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi on line oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah.
- h. Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Perubahan RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rencana kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kapanewon.

Pada forum Perangkat daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku OPD baik dari kelompok maupun dari masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan Perangkat Daerah Kabupaten, Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Tantangan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, dapat diidentifikasi ke dalam (7) tujuh isu strategis yaitu Kemiskinan, Kecacatan, Ketelantaran, Ketunaan susila, Keterasingan, korban Bencana, Korban tindak kekerasan dan Exploitasi dan Diskriminasi.

Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, Program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh (7) isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial antara lain, Fakir miskin, Lanjut usia terlantar, Penyandang cacat, Anak terlantar, Komunitas anak terpencil, Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Tunawisma.

Pembangunan Urusan kesejahteraan sosial adalah :

- 1) Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- 2) Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
- 3) Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
- 4) Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
- 5) Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia potensial;
- 6) Terjaminnya Eks penderita penyakit kronis dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
- 7) Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;

- 8) Tersedianya jangkauan dan jaminan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua propinsi dan Kabupaten /Kota.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran pada Renja OPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2022
		Meningkatnya Layanan Capaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pencapaian program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah	100 %
1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat, Menurunnya Kemiskinan dan Mengurangi Pengangguran	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Capaian penanganan permasalahan sosial	72.32 %
		Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	73,72 %

3.3. Program dan Kegiatan

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah "**Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas**", dengan prioritas yang ditetapkan meliputi :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, industrialisasi, dan kesempatan Kerja

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

5. Stabilitas Pertahan dan Keamanan

Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang telah dituangkan dalam RKP 2021 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai dan beriringan dengan ketersediaan anggaran. Adapun Secara rinci usulan Program dan kegiatan Tahun 2022 sebagaimana Tabel 3.2 sebagai beriku

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2022 disusun berdasarkan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas Sosial PPPA 2017-2022 serta Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Penyusunan Renja OPD ini dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mencapai program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, kecamatan dan pemangku pembangunan lainnya yang telah menghasilkan prioritas kegiatan dan sasaran merupakan acuan/pedoman dalam pelaksanaan Forum OPD yang selanjutnya akan dilanjutkan dalam Forum Musrenbang untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan APBD Tahun 2022.

Agar realisasi Program dan Kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Wates, 26 Juli 2021

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulon Progo,

Drs. YOHANES IRIANTA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630527 198903 1 005

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulon Progo

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja			
			2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	Cakupan pelayanan	%	100	100	100	100
2	Indeks Perlindungan Sosial	%	84	84.14	93.82	96.72
3	Indeks Pemberdayaan Sosial	%	40.06	43.3	40.96	43.3
4	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan PUG	%	61.73	65.81	64.41	66.65
5	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	68.63	68.63	77.04	77.04

Tabel 3.3 :
Usulan Belanja Bantuan Hibah Bansos
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022

No	Uraian	OPD	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)	Keterangan
1	Bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa	Dinas Sosial PPPA	325,000,000	
	- Korban meninggal sejumlah 10 orang @Rp.5.000.000,-			
	- Korban cacat berat sejumlah 14 orang @Rp.15.000.000,-			
	- Korban cacat ringan sejumlah 13 orang @Rp.5.000.000,-			
2	Bantuan Pangan Non Tunai (5000 KK @ Rp.200.000/bulan)	Dinas Sosial PPPA	12,000,000,000	
3	Pemberian bantuan sosial anak balita terlantar sejumlah 100 anak @ Rp.1.000.000	Dinas Sosial PPPA	100,000,000	
4	Pemberian bantuan sosial bagi panti asuhan dan panti jompo sejumlah 23 panti	Dinas Sosial PPPA	360,000,000	
5	Hibah PMI	Dinas Sosial PPPA	75,000,000	
	Jumlah		12,860,000,000	

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KULON PROGO**

DOKUMEN/JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN					
	MATERI		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	TINDAKLANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK SESUAI
	ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI		
2	3	4	5	6	7	8
SK Tim Penyusun Renja SKPD	√		√			
Rencana Kerja Tim	√		√			
Data dan Informasi	√		√			
Analisis gambaran pelayanan SKPD Provinsi	√		√			
Mengkaji hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD	√		√			
Penentuan Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	√		√			
Penelaahan Rancangan awal RKPDP	√		√			
Perumusan tujuan dan sasaran	√		√			
Penelaahan usulan masyarakat	√		√			
Perumusan kegiatan prioritas	√		√			
Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD propinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten	√		√			
Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD propinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan	√		√			
Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD	√		√			
Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√		√			
Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai SE Kepala Daerah	√		√			
Sasaran program dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√		√			

2	3	4	5	6	7	8
Program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD	v		v			
Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	v		v			

Wates, 26 Juli 2021
Mengetahui
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kulon Progo

Triyono, SIP.M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661115 199603 1002

Wates, 26 Juli 2021
Disusun
A.n Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulon Progo
Sekretaris

Bambang Sudaryanto, SH
Pembina Tingkat I; IV/b
NIP. 19640704 199203 1 007

**Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2021 Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo**

Setelah Verifikasi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017 s.d 2022 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) yang di evaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW 1 tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 + (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	2,158,568,736.00	770,675,086.00	414,869,716.00	397,160,671	0.96	2,842,149,677.00	4,009,985,434.00	2
	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Kebutuhan jasa surat menyurat, jasa pegawai tidak tetap serta peralatan perkantoran berupa alat tulis kantor barang cetakan/penggandaan dan bahan pustaka	1,350,441,422.77	415,552,360.00	337,322,116.00	320,679,671	0.95	325,552,632.00		
		Pengolah data 1 orang, pengelola pengadministrasi keuangan 1 orang, pelaksana pengolah data 1 orang, sopir 1 orang, pramu kantor 1 orang, penjaga makam 1 orang, penjaga malam 1 orang, dan petugas kebersihan 1 orang								
	Penyediaan Jasa keuangan	Honor penatausahaan keuangan dan barang	212,012,684.36	90,618,250.00	30,499,000.00	30,436,200	1.00	60,325,000.00		
	Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Rapat koordinasi dan konsultasi	596,114,628.86	264,504,476.00	47,048,600.00	46,044,800	0.98	46,218,400.00		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN						2,410,053,645.00		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)	322,569,585.00	148,250,350.00	40,498,900.00	38,738,600	0.96	26,225,400.00	213,214,350.00	1
	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinsos PPPA Tahun 2021 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinsos PPPA tahun 2020	159,586,802.24	66,240,400.00	20,447,100.00	20,062,500	0.98	9,005,000.00		
	Penyusunan laporan keuangan	Dokumen laporan keuangan	41,109,732.69	19,744,800.00	6,211,800.00	6,106,800	0.98	6,220,400.00		

			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP	121,873,050.06	62,265,150.00	13,840,000.00	12,569,300	0.91	11,000,000.00		
			Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	Cakupan peningkatan sarana/prasarana Kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD (%)	4,319,764,286.83	1,747,785,745.42	205,138,000.00	192,153,952	0.94	181,145,956.00	2,121,085,653.42	0
			Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan perkantoran	3,081,210,147.43	1,189,878,475.42	205,138,000.00	192,153,952	0.94	181,145,956.00		
				Pembayaran listrik, telepon, air dan komponen listrik dan kebersihan								
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Meubelair meja front office (1 unit), kursi tunggu (2 unit), almari arsip (3 unit) komputer PC (4 unit), laptop (2 unit), printer (7 unit), scanner (1 unit), AC (2 unit), pengeras suara wireless (4 unit), LCD proyektor (1 unit)	1,238,554,139.40	557,907,270.00			#DIV/0!			
			Program Pemberdayaan Sosial	Indeks Pemberdayaan Sosial	4,123,869,999.80	2,881,074,776.00	404,870,350.00	360,613,500	0.89	1,525,523,200.00	4,767,211,476.00	1
			Peningkatan pelayanan distribusi Rastra	Terlaksananya koordinasi dan Monev bantuan Pangan	778,967,670.00	576,514,900.00	61,579,550.00	41,447,200	0.67	68,919,000.00		
				Laporan distribusi bantuan pangan					0.00			
				Sosialisasi bantuan pangan					0.00			
				Bimtek penyaluran bantuan pangan					0.00			
			Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Monitoring dan Evaluasi Kube	311,311,553.80	227,645,426.00	24,117,600.00	23,490,600	0.97	421,693,800.00		
				Data base Kube					0.00			
			Peningkatan jejaring kerjasama pelayanan sosial bagi PMKS	Kerjasama pelayanan PMKS	289,511,430.00	203,964,100.00	52,106,000.00	52,009,100	1.00	123,159,100.00		
				Sarasehan Komda Lansia	0.00				0.00			
				Pelayanan Jamkesmas terpadu					0.00			
				Fasilitasi rujukan PMKS					0.00			

				Sosialisasi jamkesus terpadu 2 kali (jamkesus terpadu APBD KP93 orang, Jamkesus terpadu non APBD KP 66 orang)						0.00					
				Fasilitasi pengiriman peserta Hari Lanjut Usia Nasional (Halun) DIY						0.00					
				Fasilitasi pengiriman pesera Hari Disabilitas Internasional (HDI)						0.00					
				Fasilitasi adopsi anak						0.00					
			Peningkatan pelayanan PKH	Upaya pemberdayaan keluarga FDS (Family DevelopmentSession) bagi KPM PKH)	557,377,730.00	366,825,100.00	65,627,400.00	60,149,800		0.92	680,185,800.00				
				Terlaksananya sosialisasi PKH						0.00					
				Bimtek graduasi PKH						0.00					
				Sosialisasi Assessment PKH graduasi						0.00					
			Peningkatan kapasitas PSKS	Terlaksananya lomba kreativitas bagi PSKS	419,699,670.00	291,930,900.00	56,860,800.00	39,088,900		0.69	49,901,000.00				
				Terbinanya LKS, WKSBM, Orsos, TKSK, PSM, KUBE, dan Karang Taruna						0.00					
				Terfasilitasinya koordinasi PSKS						0.00					
				Terfasilitasinya peserta HKS						0.00					
			Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Dokumen data kemiskinan	1,767,001,946.00	1,214,194,350.00	144,579,000.00	144,427,900		1.00	181,664,500.00				
				Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu						0.00					
				Bimtek petugas verifikasi dan validasi data						0.00					
			Program Perlindungan Sosial	Indeks Perlindungan Sosial	17,833,144,050.00	2,781,327,834.00	1,311,763,400.00	1,311,927,600		1.00	13,768,608,800.00	17,861,864,234.00			1
			Peningkatan kualitas pelayanan PMKS	Pelayanan Sosial kepada PMKS	3,633,817,115.50	2,528,646,084.00	1,162,617,500.00	1,157,122,500		1.00	13,622,045,000.00				
				Fasilitasi penyaluran bantuan sosial pangan non tunai						0.00					
			Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang dibantu	470,130,557.00	175,494,000.00	133,549,300.00	133,428,700		1.00	127,649,700.00				
				Terlaksananya Sosialisasi KSB						0.00					

				Terselenggaranya apel siaga tagana						0.00					
				Operasional posko siaga tagana						0.00					
				Jumlah KSB (Kelompok Siaga Bencana) yang dibina						0.00					
				Seragam PDH bagi tagana						0.00					
			Penjangkauan dan Pelayanan Sosial	Penjangkauan PGOT (Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar yang dilayani)	13,729,196,377.50	77,187,750.00	21,596,600.00	21,376,400		0.99	18,914,100.00				
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						0.00					
			Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Cakupan Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat Gender	802,200,000.00	581,027,000.00	67,494,900.00	66,041,800		0.98	90,731,600.00	737,800,400.00			1
			Pemberdayaan lembaga berbasis Gender	Tersusunnya laporan lembaga berbasis gender	292,148,562.00	133,463,600.00	12,603,600.00	12,540,500		0.99	54,229,500.00				
				Terfasilitasinya koordinasi GOW											
				Terfasilitasinya peringatan hari ibu											
				Terlaksananya sosialisasi berpolutik untuk perempuan											
			Peningkatan Peran Wanita	Terbinanya kewirausahaan bagi perempuan miskin	273,713,865.00	124,983,500.00	29,396,300.00	28,161,800		0.96	21,221,200.00				
				Terbinanya kelompok P2WKSS dan desa prima serta pemberdayaan ekonomi perempuan											
			Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Ekspos hasil karya kaum perempuan	236,337,573.00	107,916,700.00	0.00			#DIV/0!	15,280,900.00				
			Penguatan Pengarusutamaan Gender	Tersusunnya profil pengarusutamaan gender		99,944,600.00	13,024,800.00	12,982,000		1.00					
				Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG											
				Tersusunnya laporan evaluasi PUG, PP dan PA											
			Pemutakhiran data pilah gender dan anak	Tersedianya data pilah gender dan anak dalam pembangunan		114,718,600.00	12,470,200.00	12,357,500		0.99					
			Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	2,069,000,000.40	1,650,581,174.00	154,341,000.00	154,100,750		1.00	765,555,200.00	2,570,237,124.00			1

			Pembinaan Kabupaten Layak Anak	Terlaksananya pelatihan konvensi hak anak	161,608,200.00	124,314,000.00	41,732,500.00	41,708,500	1.00	168,898,100.00		
				Terlaksananya pembinaan kabupaten layak anak					0.00			
				Terevaluasinya kabupaten layak anak					0.00			
				Terfasilitasinya Peringatan Hari Anak					0.00			
			Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah	Penyediaan makanan tambahan bagi anak keluarga miskin	1,280,452,371.00	1,026,296,000.00	0.00		#DIV/0!			
			Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	350,662,267.80	269,740,206.00	83,700,000.00	83,534,750	1.00			
				Terlaksananya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan					0.00			
				Rapat koordinasi pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan					0.00			
				Operasional P2TP2A					0.00			
			Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	terkoordinasikannya FPKK tingkat kabupaten dan kecamatan 13 forum	276,277,161.60	230,230,968.00	28,908,500.00	28,857,500	1.00	368,722,100.00		
				Tersosialisasikannya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan					0.00			
			Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota							227,935,000.00		

Wates, Juli 2021

Kepala Dinas Sosial PPPA

Drs. YOHANES IRIANTA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630527 198903 1 005

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		
													Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
													Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1																					
1	6																				
1	6	1																			
1	6	1	2.01																		
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Tersusunnya rev.renstra,renja SKPD dan Renja Perubahan	2 dokumen	Dukungan 50% terhadap cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	100%	9,005,000	9,005,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Tersusunnya laporan triwulanan, lap tahunan, monitoring evaluasi kinerja dinas ,LKPJ,LPPD LKjlp	21 dokumen	Dukungan 50% terhadap cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	100%	11,000,000	11,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
1	6	1	2.02																		
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	Dukungan sebesar 33.33% terhadap capaian Palayanan Administrasi Perkantoran	100%	2,519,233,671	2,519,904,757					

1	6	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Dukungan sebesar 33.33% terhadap capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	49,225,000	60,325,000
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Tersusunnya laporan bulanan, semesteran, dan akhir tahun	14 dokumen	Dukungan sebesar 33.33% terhadap capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6,220,300	6,220,400
1	6	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										79,951,200	79,958,000
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Tersediannya dana untuk perjalanan dinas, makanan dan minuman koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Dukungan sebesar 100% terhadap capaian administrasi perkantoran	100%	79,951,200	79,958,000
1	6	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										14,923,000	5,000,000
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Pembelian Scanner dan printer	2 unit	Dukungan sebesar 100% terhadap Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	14,923,000	5,000,000
1	6	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										326,928,484	326,928,632

1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat, jasa pegawai tidak tetap serta peralatan perkantoran berupa alat tulis kantor barang cetakan/penggandaan dan bahan pustaka	12 bulan	Dukungan sebesar 100% terhadap capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	326,928,484	326,928,632
1	6	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										187,117,522	185,940,956
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Pembayaran listrik, telepon, air dan komponen listrik dan kebersihan, Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan perkantoran berupa kendaraan dinas roda empat 5 unit, roda 6 satu unit, roda dua 8 unit, AC 2 unit, komputer/laptop 5 unit, printer 6 unit	12 bulan	Dukungan sebesar 100% terhadap Peningkatan sarana dan Prasarana kerja dan Kualitas SDM OPD	100%	187,117,522	185,940,956
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										13,960,442,500	14,965,442,500	
1	6	4	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										13,880,657,700	14,885,657,700
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Perumahan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Rehabilitasi Sosial	42.78 nilai	Bintek penyaluran bantuan pangan Laporan distribusi bantuan pangan Sosialisasi bantuan pangan	130 orang 12 dokumen 195 orang	Dukungan 13.95 nilai Indeks Pemberdayaan Sosial	100%	80,874,000	80,874,000
										Bantuan Sosial Perawatan Jenazah Fasilitas Adopsi Anak	12 bulan 12 bulan				

1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Rehabilitasi Sosial	42.78 nilai	Fasilitasi pengiriman peserta Hari Disabilitas Internasional (HDI)	1 kali					
										Fasilitasi pengiriman peserta Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN) DIY	1 kali	Dukungan 13.95 nilai Indeks Pemberdayaan Sosial	100%	159,979,100	1,159,979,100	
										Hibah PMI	1 kali					
										Kerjasama pelayanan PMKS Pelaksanaan JAMKESUS DISABILITAS Respon Kasus	12 bulan					
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Rehabilitasi Sosial	42.78 nilai	Bansos Bagi Anak Balita Terlantar	100 anak					
										Bansos Bagi Panti Asuhan dan Panti Jompo	23 panti					
										Bansos Bagi Psicotik	20 orang					
										Bansos Bantuan Pangan Non Tunai	5000 kk					
										Fasilitasi penyaluran bansos kecelakaan kerja bagi penderes	37 kasus	Dukungan 13.95 nilai Indeks Pemberdayaan Sosial	100%	13,619,200,500	13,624,200,500	
										Pelayanan Sosial kepada PMKS Terfasilitasinya	12 bulan					
										KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah)88 orang Tersosialisasikannya mekanisme pemberian bantuan (1 kali)	11 bulan					
											120 orang					
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Rehabilitasi Sosial	42.78 nilai			Dukungan 13.95 nilai Indeks Pemberdayaan Sosial	100%	20,604,100	20,604,100	

1	6	4	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial										79,784,800	79,784,800	
1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Rehabilitasi Sosial	42.78 nilai	Terbinannya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)WKSBM,Orsos,T KSK,PSM,KUBE dan Karang Taruna Terfasilitasinya koordinasi PSKS Terlaksannnya Lomba Kreativitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	7 lembaga 4 kali 1 kali	Dukungan 13.95 nilai Indeks Terhadap Indeks Perlindungan Sosial	100%	55,966,000	55,966,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Rehabilitasi Sosial	42.78 nilai	Database KUBE	1 dokumen	Dukungan 13.95 nilai Indeks Terhadap Indeks Perlindungan Sosial	100%	23,818,800	23,818,800	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										340,339,200	340,339,300		
1	6	5	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										340,339,200	340,339,300	
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial	94.41 nilai	Bintek petugas verifikasi dan validasi data Rekap data kesejahteraan sosial Verifikasi dan Validasi Data Terpadu	95 orang 1 dokumen 20000 RT	Dukungan 47,047 nilai terhadap Cakupan Pemberdayaan Sosial	100%	232,878,500	232,878,500	
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial	94.41 nilai	Fasilitasi Kegiatan FDS (Family Development Session) PKH Sosialisasi BKK UEP PKH Graduasi Terlaksannnya Sosialisasi PKH	0 0 0 4 kali 203 orang 120 orang	Dukungan 47,047 nilai terhadap Cakupan Pemberdayaan Sosial	100%	107,460,700	107,460,800	
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA										137,399,700	137,399,700		
1	6	6	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota										137,399,700	137,399,700	

1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Penanganan Bencana	1.00 nilai	Jumlah Korban Bencana yang dibantu Operasional Posko Siaga Tagana Terlaksananya Sosialisasi KSB Terlaksananya bimbingan teknis Tagana dan KSB Terselenggaranya Apel Siaga Tagana Upacara Hari Pahlawan	150 kk 12 bulan 80 orang 150 orang 155 orang 1 kali	Dukungan 128.77 nilai terhadap Indeks Perlindungan Sosial	100%	137,399,700	137,399,700	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										442,826,700	442,826,800
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										41,950,100	41,950,100
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										41,950,100	41,950,100
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	68.81 %	Ekspos hasil karya kaum perempuan	1 kali	Dukungan 33.305% terhadap Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	100%	16,915,900	16,915,900	
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	68.81 %	Pelatihan Kewirausahaan P2WKSS, Desa Prima dan Perempuan Pelaku Industri Rumahan Penilaian Kalurahan Pelaksana Program Terpadu Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	40 orang 1 Kali	Dukungan 33.305% terhadap Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	100%	25,034,200	25,034,200	

									Terbinanya Kelompok P2WKSS	8 Kelompok						
2	8	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									138,655,100	138,655,100		
2	8	3	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									138,655,100	138,655,100		
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan perlindungan perempuan	99.99 %	Operasional P2TP2A Tersosialisasinya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Tersosialisasinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	12 bulan 110 orang 36 sekolah	Dukungan 88.86% terhadap Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	100%	138,655,100	138,655,100	
2	8	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									60,441,500	60,441,500		
2	8	5	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									60,441,500	60,441,500		
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	91.60 nilai	Seminar Peringatan Hari Kartini Terbentuknya desa sadar gender Terfasilitasinya koordinasi GOW Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG Terlaksananya sosialisasi berpolitik untuk perempuan Tersedianya data pilah gender dan anak dalam pembangunan Tersusunnya laporan evaluasi PUG Tersusunnya laporan lembaga berbasis gender	1 kali 7 desa 12 kali 26 orang 65 orang 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Dukungan 249.32 nilai terhadap Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	100%	60,441,500	60,441,500	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

									Tersusunnya profil pengarusutamaan gender	1 dokumen				
2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								201,780,000	201,780,100	
2	8	6	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								201,780,000	201,780,100	
									Pembinaan desa layak anak	12 desa				
									Pembinaan kecamatan layak anak	12 kali				
									Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah di keluarga miskin	370 anak				
									Terevaluasinya kabupaten layak anak	1 dokumen				
									Terfasilitasinya forum anak kabupaten	3 kali				
									Terfasilitasinya forum anak kecamatan	12 kali				
									Terfasilitasinya Peringatan Hari Anak	1 kali				
									Terlaksannya pelatihan konvensi hak anak	100 orang				
									Terlaksannya pembinaan kabupaten layak anak	12 kali				
									Tersusunnya kebijakan tentang pengembangan KLA	1 perbup				
TOTAL											18,084,612,277	19,090,291,045		

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2022 Kabupaten Kulon Progo
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5,356,385			5,356,385					
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,161,485			3,161,485					
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					45,887,100			45,887,100					
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	Tersusunnya rev,renstra,renj a SKPD dan Renja Perubahan		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 dokumen		25,797,100			Capaian Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/K ota	100%	25,797,100
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	Tersusunnya laporan triwulanan, lap tahunan, monitoring evaluasi kinerja dinas ,LKPD,LPPD LKiln		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 dokumen	100%	20,090,000			Capaian Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/K ota	100%	20,090,000
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,477,290,445			2,477,290,445					
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja				100%			2,410,053,645			Capaian Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/K ota	100%	2,410,053,645

1	6	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%				60,325,000			Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	60,325,000
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	Tersusunnya laporan bulanan, semesteran, dan akhir tahun		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	14 dokumen			6,911,800			Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	6,911,800
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									94,022,200					94,022,200
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	Tersediannya dana untuk perjalanan dinas, makanan dan minuman koordinasi dan konsultasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan			94,022,200			Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	94,022,200
1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									5,000,000					5,000,000
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja													
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									326,928,632					326,928,632

1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat, jasa pegawai tidak tetap serta peralatan perkantoran berupa alat tulis kantor barang cetakan/penggunaan dan bahan pustaka	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	344,746,840			Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	344,746,840
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						199,934,900				199,934,900	
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	Pembayaran listrik, telepon, air dan komponen listrik dan kebersihan, Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan perkantoran berupa kendaraan dinas roda empat 5 unit, roda 6 satu unit, roda dua 8 unit, AC 2 unit, komputer/laptop 5 unit, printer 6 unit	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	199,934,900			Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	199,934,900
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1,606,858,700				1,606,858,700	
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						1,480,959,800				1,480,959,800	
							Bintek penyaluran bantuan pangan			130 orang						

1	6	4	2.01	1	Penyediaan Perumahan	Indeks Rehabilitasi Sosial	Laporan distribusi bantuan pangan Sosialisasi bantuan pangan Terlaksananya koordinasi dan monev bantuan pangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.78 nilai	12 dokumen 225 orang 12 kali		100,100,250		Indeks Rehabilitasi Sosial	42.78 nilai	100,100,250
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Indeks Rehabilitasi Sosial	Bantuan Sosial Perawatan Jenazah Fasilitasi pengiriman peserta Hari Disabilitas Internasional (HDI) Fasilitasi pengiriman peserta Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN) DIY Hibah PMI Kerjasama pelayanan PMKS	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.78 nilai	1 tahun 1 kali 1 kali 1 tahun 25 lembaga		137,513,000		Indeks Rehabilitasi Sosial	42.78 nilai	137,513,000
							Bansos Bagi Anak Balita Terlantar Bansos Bagi Panti Asuhan dan Panti Jompo Bansos Bagi Psikotik Bansos Bantuan Pangan Non Tunai Bansos Kecelakaan Kerja Bagi Penderita Kelapa			100 anak 23 panti 20 orang 5000 kk 37 kasus						

1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Indeks Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi penyaluran bansos PMKS Fasilitasi penyaluran bantuan pangan non tunai Pelayanan Sosial kepada PMKS Terfasilitasinya KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah)88 orang Tersosialisasinya mekanisme pemberian bantuan (2 kali)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.78 nilai	7 jenis 5000 RT 12 bulan 12 bulan 290 orang			1,215,323,450			Indeks Rehabilitasi Sosial	42.78 nilai	1,215,323,450
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Indeks Rehabilitasi Sosial		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.78 nilai				28,023,100			Indeks Rehabilitasi Sosial	42.78 nilai	28,023,100
1	6	4	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								125,898,900					125,898,900	
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	Indeks	Terbinannya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)WKSBM,Orsos,TKSK,PSM, KUBE dan Karang Taruna Terfasilitasinya koordinasi PSKS	Kab. Kulon Progo, Semua		7 lembaga 4 kali						Indeks	42.78	

1	6	4	2.02	8	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rehabilitasi Sosial	Terfasilitasinya PSKS dalam Upacara Hari Kesetiakawanan Sosial Terlaksannya Lomba Kreativitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.78 nilai	1 kali 1 kali	82,005,000		Rehabilitasi Sosial	42.78 nilai	82,005,000	
1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi	Indeks Rehabilitasi Sosial	Database KUBE Sosialisasi Bansos KUBE Terlaksannya monitoring dan Evaluasi KUBE dan UEP	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.78 nilai	1 dokumen 50 kelompok 2 dokumen	43,893,900		Indeks Rehabilitasi Sosial	42.78 nilai	43,893,900	
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								430,119,900				430,119,900	
1	6	5	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								430,119,900				430,119,900
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bintek petugas verifikasi dan validasi data Dokumen data kemiskinan Koordinasi petugas verval data Verifikasi dan Validasi Basis data Terpadu	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94.41 nilai	102 orang 1 dokumen 12 kali 20500 RT	288,119,000		Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial	94.41 nilai	288,119,000	
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	Indeks Perlindungan	Bintek graduasi PKH Buku data Penerima PKH Fasilitasi Kegiatan FDS (Family Development Session)	Kab. Kulon Progo, Semua	94.41 nilai	203 orang 1 dokumen 4 kali	142,000,000		Indeks Perlindungan dan	94.41	142,000,000	

1	6	6	2.02	2	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	dan Jaminan Sosial	Koordinasi PKH Sosialisasi Assesment PKH Graduasi Terlaksananya Sosialisasi PKH		Kecamatan, Semua Kelurahan	24.41 nilai	7 kali 203 orang 120 orang		142,000,300		Jaminan Sosial	nilai	142,000,300
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							157,234,300				157,234,300	
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							157,234,300				157,234,300	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Indeks Penanganan Bencana	Jumlah Korban Bencana yang dibantu Operasional Posko Siaga Tagana Terlaksananya Sosialisasi KSB Terlaksananya bimbingan teknis Tagana dan KSB Terselenggaranya Apel Siaga Tagana Upacara Hari Pahlawan		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127.34 nilai	250 kk 12 bulan 80 orang 300 orang 155 orang 1 kali		157,234,300		Indeks Penanganan Bencana	127.34 nilai	157,234,300
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							571,592,825				571,592,825	
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							66,362,800				66,362,800	
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							66,362,800				66,362,800	

2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Ekspos hasil karya kaum perempuan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.81 %	1 kali		30,091,000		Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	68.81 %	30,091,000
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima Terbinanya Kelompok P2WKSS	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.81 %	40 orang 1 kali	100%	36,271,800		Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	68.81 %	36,271,800
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							175,000,000		175,000,000		
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							175,000,000		175,000,000		
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perlindungan perempuan	Operasional P2TP2A Tersosialisasinya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Tersosialisasinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.99 %	12 bulan 110 orang 36 orang		175,000,000		Cakupan perlindungan perempuan	99.99 %	175,000,000
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							85,355,690		85,355,690		
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							85,355,690		85,355,690		

2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Terbentuknya desa sadar gender Terfasilitasinya koordinasi GOW Terlaksannnya pelatihan PPRG dan ARG Terlaksannnya sosialisasi berpolitik untuk perempuan tersediannya data pilah gender dan anak dalam pembangunan Tersusunnya laporan evaluasi PUG,PP dan PA Tersusunnya laporan lembaga berbasis gender Tersusunnya profil pengarusutamaan gender Upacara Peringatan Hari Kartini	244,874,335	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220.84 nilai	7 dsae 12 kali 26 orang 65 orang 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kali	85,355,690	Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	220.84 nilai	85,355,690
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									201,780,100			201,780,100
2	8	6	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								201,780,100			201,780,100
						Pembinaan desa layak anak Pembinaan kecamatan layak anak					12 desa 12 kali				

					Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah di keluarga miskin				370 anak						
					Terevaluasinya kabupaten layak anak				1 dokumen						
					Terfasilitasinya forum anak kabupaten				3 kali						
					Terfasilitasinya forum anak kecamatan				12 kali						
					Terfasilitasinya Peringatan Hari Anak				1 kali						
					Terlaksannya pelatihan konvensi hak anak				100 orang						
					Terlaksannya pembinaan kabupaten layak anak				12 kali						
					Tersusunnya kebijakan tentang pengembangan KLA				1 perbup						
										TOTAL	5,927,687,210				5,927,687,210

	1	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	63,06%	45,00%	45,00%	45,00%	50,00%	63,50%	45,00%	45,00%	65,00%	
II SPM Urusan Pemberdayaan Perempuan													
	1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pengasuhan oleh petugas terlatih di dalam UPT	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak dan Pusat Pelayanan Terpadu/ Pusat Krisis Terpadu di rumah sakit	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT	75%		75%	75%	75%	75%	100%	75%	75%	75%	
	4	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT	75%		75%	75%	75%	75%	100%	75%	75%	75%	
	5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%		80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%	
	6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%		50%	50%	50%	50%	100%	50%	50%	50%	
	7	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%		50%	50%	50%	50%	0	50%	50%	50%	

8 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	80%		80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%	
---	-----	--	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	--